



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DALAM RIPPARDA KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2014-2025 DI DESA WISATA TEPUS, KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT POLICY IN RIPPARDA GUNUNGGKIDUL REGENCY IN 2014-2025 IN TEPUS TOURISM VILLAGE, GUNUNGGKIDUL REGENCY

Seto Panggalih¹, Lena Satlita²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article history:

Diterima 19-01-2024

Diperbaiki 21-01-2024

Disetujui 22-01-2024

Kata Kunci:

Desa wisata Tepus, Gunungkidul, Implementasi kebijakan, Pariwisata, Kebijakan, RIPPARDA 2014-2025

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan RIPPARDA 2014-2025 dalam pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Tepus Gunungkidul. Sebelumnya, peneliti telah mengidentifikasi mengapa penelitian ini perlu dilakukan karena adanya berbagai permasalahan seperti adanya sampah yang tidak dikelola dengan baik, pembangunan yang tidak ramah lingkungan, maupun UMKM yang kurang berkembang. Dalam memperoleh data, penelitian ini menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi serta diolah menggunakan pendekatan Triangulasi Dimana menggunakan berbagai sumber untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan berkualitas. Hasilnya, menunjukkan kebijakan belum optimal karena terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi diantaranya indikator pariwisata yang menggerakkan perekonomian daerah dan mengkomunikasikan pariwisata daerah.

ABSTRACT

Keywords:

Tepus tourist village, Gunungkidul, Policy implementation, Tourism, Policy, RIPPARDA 2014-2025

This research aims to see the extent of success in implementing the 2014-2025 RIPPARDA policy in sustainable tourism in the tourist village of Tepus Gunungkidul. Previously, researchers had identified why this research needed to be carried out because of various problems such as waste that was not managed properly, development that was bad environmentally and micro bussines that were underdeveloped. In obtaining data, this research uses observation, interview and documentation techniques and is processed using a triangulation approach which uses various sources to obtain good and quality research results. The results show that the policy is not yet optimal because there are several indicators that have not been met, including tourism indicators that drive the regional economy and communicate regional tourism.

1. Pendahuluan

Pariwisata dianggap dapat menjadi penggerak utama ekonomi beriringan dengan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. World Tourism Organization (1998) memprediksi bahwa mobilitas wisatawan dunia akan mencapai angka 900 juta pada tahun 2024. Begitu juga Penelitian yang dilakukan oleh World Travel and Tourism Council (1997) menemukan fakta yaitu sebesar 10,9 persen dari GDP dunia dan menyerap lapangan kerja sebesar 10,7 persen dari total jumlah penduduk di dunia. Dampak positif sektor pariwisata juga harus dilakukan secara terus menerus. Oleh karena itu, konsep pariwisata berkelanjutan sangat penting diterapkan untuk keberlangsungan sektor pariwisata di masa depan.

Menurut Federation of Nature and National Parks dalam Arida (2017) merupakan segala bentuk pembangunan, pengelolaan, dan aktivitas pariwisata harus memperhatikan integritas lingkungan, ekonomi, sosial, dan kesejahteraan dari sumber daya alam dan budaya yang ada untuk jangka waktu yang lama. Pariwisata berkelanjutan berfokus pada masyarakat lokal yang harus terlibat dalam berbagai kegiatan pariwisata dengan adil dalam memperoleh manfaat baik segi sosial ataupun budaya, ekonomi, serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan secara langsung maupun tidak langsung.

Upaya untuk mengakses manfaat pariwisata, dibutuhkan perhatian lebih pada aktivitas pariwisata yang berkelanjutan. Perhatian tersebut, terlihat dari pandangan pemerintah daerah terkait pariwisata berkelanjutan yang kemudian dijadikan sebagai visi atau pedoman dalam menjalankan serta mengelola aktivitas kepariwisataan. Visi sebagai tujuan pariwisata berkelanjutan di Gunungkidul ini, harapannya mampu menciptakan peningkatan integritas, dinamika dan kesejahteraan jasmanirohani (yang meliputi sosial, budaya, ekonomi dan agama) masyarakat Kabupaten Gunungkidul secara berkesinambungan berdasarkan atas keharmonisan hubungan antar manusia dan antara manusia dengan lingkungan.

Usaha untuk mencapai visi tersebut, pemerintah daerah berupaya Menyusun misi yang dituangkan dalam master plan sebagai arah kebijakan pariwisata berkelanjutan. Rancangan tersebut dimuat dalam peraturan daerah kabupaten Gunungkidul nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Gunungkidul tahun 2014-2025 juga menyoroti pentingnya pariwisata berkelanjutan. Dalam RIPPARDA Kabupaten Gunungkidul tahun 2014-2025 pada Bab II pasal 3 ayat 4 dan 5 disebutkan bahwa pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 4 indikator yaitu pariwisata yang menggerakkan perekonomian daerah, kuantitas dan kualitas pariwisata, aktivitas mengkomunikasikan pariwisata, dan kelembagaan dan tata kelola pariwisata daerah.

Salah satu implementasi RIPPARDA sebagai pedoman pelaksanaan pariwisata di Gunungkidul, pemerintah daerah membagi wilayah Gunungkidul menjadi tiga bagian. Pembagian wilayah diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan daya tarik obyek wisata baik aksesibilitas, informasi, atraksi, fasilitas pendukung dan lingkungan serta untuk keseimbangan berbagai kepentingan supaya tidak rancu dan dapat mendukung implementasi pariwisata berkelanjutan.

Dalam mengoptimalkan pariwisata, dibutuhkan konsistensi dari pemerintah daerah serta pelaku wisata dalam menegakkan kebijakan untuk menjaga lingkungan

dan mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Hal ini bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu namun semua elemen yang terlibat di dalamnya misalnya pemerintah daerah, pelaku wisata, wisatawan, masyarakat setempat dan lain sebagainya. Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun, masih terdapat beberapa informasi yang menggambarkan adanya ketidak optimalan dalam menegakkan aturan mengenai lingkungan pariwisata yang berkelanjutan. Ketidakefektifan tersebut tergambar pada beberapa penyimpangan seperti maraknya penumpukan sampah plastik di area sekitar destinasi wisata pantai maupun jalan menuju wisata pantai di Kabupaten Gunungkidul (news.detik.com). Penumpukan sampah di kawasan wisata pantai diantaranya Area Pantai Drini, Area Pantai Tanjung Kesirat, Area Pantai Indrayanti, Jalan Menuju Pantai Watu Kodok, dan Jalan Menuju Pantai Poktunggal.

Kendala lain mengenai masalah penanganan sampah di destinasi wisata yaitu masih minimnya tempat sampah di destinasi wisata. Kurangnya kesadaran masyarakat pelaku wisata akan pentingnya tempat sampah pada toko ataupun warung tempat usaha mereka menjadi kendala utama. Pembuangan sampah masih terfokus pada titik-titik tempat sampah umum yang dikelola oleh kelompok setempat. Hal ini disinyalir kurang adanya dukungan fasilitas tempat sampah pada setiap destinasi wisata oleh pemerintah maupun masyarakat setempat.

Selain permasalahan mengenai sampah, masalah pembangunan wisata baru di area hutan jati kawasan Tepus Kabupaten Gunungkidul juga menjadi masalah penting untuk diperhatikan. Pembagian wilayah sektor pariwisata menjadi hal yang menarik untuk berinvestasi dengan jangka waktu menengah hingga jangka waktu yang panjang. Hal ini mengundang minat para investor dalam mengembangkan dunia pariwisata di berbagai wilayah di Kabupaten Gunungkidul.

Bagian pariwisata sisi selatan tak luput dari gurita bisnis investor di dunia wisata. Adanya pembukaan destinasi wisata baru di lahan-lahan pertanian dan hutan jati masyarakat menjadi tantangan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga seperti penelitian yang berjudul Dampak Pembangunan Villa Dan Resort Raffi Ahmad Terhadap Kawasan Bentang Alam Karst Gunungkidul oleh Muhammad Fikriansyah Universitas Negeri Yogyakarta yang berisi tentang pandangan pengamat lingkungan pada pembangunan villa dan resort yang berpotensi mengancam keberlangsungan lingkungan. Selain itu, pengelolaan sampah yang kurang optimal dan telah diteliti oleh Jussac Maulana Masjhoer Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta yang memuat pendapat dari pelaku wisata yang tidak memiliki waktu untuk mengolah sampah di lingkungan Pantai Pulang Sawal sebagai bagian dari Desa Wisata Tepus. Hal tersebut menunjukkan minimnya kesadaran berpariwisata yang sesuai dengan konsep pariwisata berkelanjutan.

Melalui paparan informasi di atas, peneliti merasa adanya kebijakan yang kurang optimal sebab fenomena-fenomena di atas semestinya tidak terjadi sebab telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten Gunungkidul nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Gunungkidul tahun 2014- 2025. Oleh karenanya, peneliti berupaya untuk mengkaji lebih dalam tentang implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Tepus Gunungkidul dengan judul "Implementasi

Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Ripparda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025 Di Desa Wisata Tepus, Kabupaten Gunungkidul”.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang berusaha memberikan penjelasan dan gambaran mengenai berbagai macam data yang telah dikumpulkan dari objek penelitian yaitu objek wisata. Sugiyono (2016) mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan penelitian naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Penelitian kualitatif memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (reciprocal)

Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di desa wisata Tepus Gunungkidul.

Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan metode Triangulasi. Moloeng (2018: 330) berpendapat bahwa triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lainnya di luar data itu. Teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksanaan keabsahan data dengan menggunakan beragam sumber, teknik, dan waktu di luar data yang diperoleh. Teknik ini dipergunakan untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, dan interpretatif dari penelitian kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pariwisata yang menggerakkan perekonomian daerah

Indikator ini dapat diukur menggunakan beberapa sub indikator yang meliputi Peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk pendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Pada intinya, pariwisata berkelanjutan diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan penduduk di Desa Wisata Tepus. Dilihat dari kacamata pemangku kebijakan dari segi kebijakan tentang investasi yang ada di wilayah Tepus ini ditujukan pada intinya untuk berkolaborasi dengan penduduk setempat. Sudah banyak investor masuk, dan sebagian besar investor lokal bermitra dengan UMKM setempat untuk sama-sama mensukseskan pariwisata. Kolaborasi ini ditunjukkan dalam paket wisata, kesepakatan pembagian keuntungan, dan juga kerjasama untuk meningkatkan animo pengunjung. Narasumber mencontohkan berbagai bentuk kerjasama yang berkembang di wilayah desa wisata Tepus seperti penginapan yang berkolaborasi dengan pengelola desa wisata, layanan paket tour the village, dan Marketing collaboration dengan HeHa Group Pada intinya, kebijakan tentang investasi ini tidak hanya memberi ruang pada investor tetapi juga banyak memihak masyarakat supaya tidak terjadi praktik monopoli dan tetap mendapat manfaat dari pariwisata. Sejauh ini implementasi kebijakan yang berkaitan dengan investasi dirasa cukup efektif. Karena semenjak investor masuk, turut menambah energi masyarakat untuk terus

berkembang dan berinovasi. Selain berinvestasi, pemerintah juga mengupayakan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan keberhasilan pariwisata yang menggerakkan perekonomian daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan, maka pemerintah berusaha untuk melakukan promosi guna meningkatkan daya jual wisata. Sejauh ini pemerintah telah berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Dinas Pariwisata, Dinas UMKM, Dinas Lingkungan Hidup, influencer, Perguruan tinggi, BUMN, paguyuban dimas diajeng, maupun dengan berbagai media. Disisi lain, promosi yang massif disertai dengan perbaikan kualitas baik SDM maupun SDA. Sejauh ini yang sudah dilakukan pemerintah adalah menyelenggarakan pelatihan seperti pelatihan digital marketing dari BUMN Garuda Indonesia bekerjasama dengan mahasiswa program Merdeka kampus Merdeka, pelatihan pembuatan mie dan menu camilan dari Talas atau kimpul, Pelatihan pembuatan es krim dari sukun dan kelapa yang juga bekerjasama dengan mahasiswa, inklusi keuangan dan lain sebagainya. Pelatihan dan pengembangan tersebut sangat strategis untuk diterapkan oleh masyarakat karena semuanya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pengembangan wisata sebagian besar sudah memanfaatkan lingkungan selaras dengan konsep keberlanjutan lingkungan. Pemerintah melihat potensi yang perlu di manfaatkan dari berbagai sisi baik yang disediakan oleh alam maupun sumber daya manusia yang mengolah alam itu sendiri. Pengalaman akan mengolah lingkungan akan diturunkan dari generasi ke generasi. Disisi lain, gambaran memanfaatkan sumber daya lingkungan yang dipraktikkan oleh masyarakat kita punya UMKM singkong yang menjadi berbagai olahan oleh-oleh khas salah satunya pathilo, UMKM Perak, UKM Batik, yang tentunya semuanya mengangkat dan memanfaatkan lingkungan setempat untuk mengembangkan wisata. Tidak lupa, sebagai Upaya untuk menunjang pariwisata berkelanjutan, pihak- pihak ini bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengelola limbah industri.

Meski demikian, pemerintah tetap menghadapi kendala dalam mengimplementasikan pariwisata berkelanjutan. Sesuai dengan data yang diperoleh, penerapan pariwisata berkelanjutan tentu ada yang menangkap peluang yang diberikan oleh pemerintah ada juga yang merasa dirugikan sebab tidak memiliki kapasitas untuk bersaing. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sehingga tidak ada lagi yang menilai negatif kebijakan dan program yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pada indikator ini, apabila dilihat dari sudut pandang pengelola wisata dengan sub indikator yang sama, pengelola wisata memiliki sudut pandang yang hampir sama, bahwa sejauh ini narasumber sepakat dan paham dengan upaya pemerintah dalam memberi kesempatan pelaku wisata lokal. Pandangan tersebut hadir sebab pelaku wisata merasa mendapatkan dampak positifnya karena wisatawan mencari opsi destinasi yang lain di sekitar destinasi milik investor.

Atas kerjasama yang sudah dijalin oleh pemerintah, pemerintah daerah tidak lupa memberikan akses kepada pemerintah kalurahan dalam hal ini desa wisata untuk tergabung dalam program DESAPRENEUR. Artinya PEMDA memberikan otonomi penuh dalam hal mengembangkan desa wisata. selain itu narasumber juga

merasa diberi kebebasan untuk membuat program, event maupun terlibat dalam berbagai penghargaan bergengsi. Intinya, inovasi dan kreativitas tidak dibatasi, hanya saja harus mencari source atau sumber daya pendukung seperti dana, tenaga, dan waktu sendiri.

Segala upaya pemerintah untuk mewujudkan indikator ini, ternyata dari sudut pandang pengelola wisata merasa kebijakannya belum optimal di bidang perluasan lapangan kerja. Karena masih minimnya peluang kerja di kawasan desa wisata. Meski demikian, terdapat beberapa manfaat dari upaya pemerintah yang bisa diambil pengelola wisata sebagai bekal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Manfaat yang diperoleh dari adanya pariwisata berkelanjutan dari segi ekonomi ini, pelaku wisata mendapatkan pelatihan-pelatihan tentang menjaga dan mengembangkan potensi lokal dengan meningkatkan daya beli serta menambah wawasan mengenai upaya preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan. Selain itu, mereka juga dapat melihat peluang dari apa yang disediakan oleh alam di desa wisata Tepus.

Aspek penilaian efektivitas implementasi kebijakan menurut pengelola wisata, narasumber menyadari adanya kewajaran kebijakan dan program yang tidak sempurna. Meskipun upaya yang dilakukan sudah banyak dan baik, namun masih terdapat beberapa yang luput seperti adanya komunikasi yang sering kali tidak lancar. Sebab, seringkali informasi yang disampaikan tidak merata, mendadak, maupun kurangnya pemetaan sebuah program hanya terkesan sebatas dilaksanakan dan tidak membekas apabila sudah selesai. Pada indikator ini, kedua pihak baik pemangku kebijakan maupun pelaku wisata sama-sama menyadari masih ada kebijakan yang belum optimal.

1. Kuantitas dan Kualitas Pariwisata

Apabila dilihat dari sudut pandang pemerintah, untuk mewujudkan indikator ini yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan memperbanyak kerjasama, menciptakan peluang dan fokus pada pengembangan sumber daya lokal melalui pengembangan keterampilan (pelatihan). Apabila kualitas sudah bagus, maka kuantitas akan mengikuti. Kuantitas ini bisa berupa jumlah wisatawan yang berkunjung ke desa wisata, bisa juga kuantitas usaha yang berkembang, maupun kuantitas SDM lokal yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata.

Kualitas dan kuantitas pada indikator ini tidak hanya mengukur dari sisi internal dan hal-hal positifnya saja. Melainkan, indikator ini juga mencakup angka kecelakaan maupun kriminalitas untuk mengukur kualitas kelayakan sebuah destinasi wisata. Sesuai dengan pendapat narasumber, kejadian bencana, sejauh ini tidak ada. Angka kecelakaan, tentu ada namun jumlah per tahunnya tidak lebih dari 50 kasus, untuk kriminalitas, sejauh ini aman karena adanya tim gabungan yang solid dan bertanggung jawab. Sejalan ini pemerintah telah menyelenggarakan beberapa program yang mendukung keamanan wisata Bersama tim CHSE (Cleanliness, Health, Safety, dan Environment) sesuai standar desa wisata dengan melibatkan berbagai pihak seperti pokdarwis, SAR dan pihak keamanan setempat. Program tersebut juga disertai dengan implementasi fisik yang dapat diakses oleh wisatawan sehingga wisatawan merasa nyaman, diantaranya perbaikan fasilitas vital seperti jalan, apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, maka

pemerintah bekerjasama dengan pelaku wisata untuk menyediakan alat transportasi yang memudahkan wisatawan mengeksplor desa wisata sesuai dengan kebutuhan. Bisa dengan menyediakan shuttle ataupun jeep, Kemudian menyediakan cuci tangan dari program CHSE pemerintah pusat, pengadaan fasilitas tempat sampah dan tempat ibadah yang strategis di kawasan destinasi wisata.

Efektivitas implementasi kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata, pemangku kebijakan merasa sudah 70% sebab pariwisata di Tepus ini semakin maju dan berkembang. Kesadaran akan potensi wisata dari masyarakat, semakin mendukung keberhasilan pariwisata berkelanjutan sebab mereka mulai sadar tentang menjaga lingkungan (mengelola limbah dan mengatasi sampah), mengambil peran dalam kepariwisataan, sadar akan kesejahteraan, profesi yang mulai bervariasi, dan masyarakatnya mulai belajar tentang teknologi. Pemerintah optimis apabila Sumber Daya Alam yang dijaga dikolaborasikan dengan Sumber Daya Manusia yang ingin belajar, dan peran teknologi, akan membuat wisatawan yang masuk ke Desa Wisata Tepus semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Apabila dilihat dari kaca mata pengelola wisata dalam mewujudkan keberhasilan sesuai dengan indikator ini, narasumber merasa pemerintah kalurahan juga peduli dengan keamanan waganya yang dibuktikan dengan adanya kerjasama dengan pihak keamanan Polsek Tepus untuk melakukan patroli di hari-hari ramai, misalnya libur mingguan maupun libur panjang. Kenaikan pengunjung signifikan menjadi fokus keamanan. Selain pihak kepolisian, desa wisata tepus juga bekerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman bagi semua pihak. Menurutnya, kebijakan pariwisata berkelanjutan dalam menjaga lingkungan pariwisata yang aman dan nyaman sangat berpengaruh positif untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke desa wisata Tepus. Berkaitan dengan prospektif hubungan kebijakan dengan jumlah pengunjung narasumber mengatakan keduanya memiliki korelasi yang sangat tinggi. Sebab, apabila kebijakan diimplementasikan dengan bertanggung jawab, maka hasilnya akan signifikan.

3.2. Aktivitas Mengomunikasikan Pariwisata Daerah

Aktivitas mengkomunikasikan ini tercermin dalam upaya pemerintah dalam melakukan promosi dan pemasaran. Sesuai dengan data yang diperoleh, Pemerintah kalurahan berupaya melakukan pemasaran digital melalui SID (Sistem Informasi Desa) yang merupakan fasilitas dari pemerintah pusat. Selain itu, penggunaan website official dan Instagram pemerintah yang dilinkkan ke SID. Selain itu Kerjasama juga dilakukan antar pemerintah kalurahan dan Lembaga pemerintah lainnya dan pihak swasta seperti biro dan agen wisata. Wujud implementasi kebijakan ini, pemerintah menggunakan media massa baik media online maupun cetak untuk mendorong agar pihak atau pelaku wisata mau melakukan pemasaran digital. Selain itu Kerjasama dengan perguruan tinggi dan komunitas untuk meningkatkan SDM pelaku wisata. Media dan sarana promosi tersebut dipilih karena relevan dengan perkembangan zaman serta memiliki target pasar yang lebih luas.

Sejauh ini dibuktikan dengan adanya peningkatan wisatawan dari luar kota maupun luar provinsi seperti provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, ada juga yang luar pulau seperti Kalimantan. Aktivitas promosi yang dilakukan oleh pemerintah ini, tidak semata-mata dilakukan dengan spontan melainkan terencana. Sebab, pemerintah menyiapkan tenaga ahli dan tenaga khusus di bidang digital marketing untuk melakukan branding desa atau kalurahan Tepus. Pemerintah juga bekerjasama dengan influencer dan mentor sebagai fasilitas pendampingan dan pelatihan professional di bidang marketing. Serta memanfaatkan program CSR seperti ahli konsultan atau Public Relation yang sudah berjalan hampir dua tahun.

Indikator komunikasi wisata apabila dipandang dari sisi yang berbeda dalam hal ini pengelola wisata, narasumber mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan oleh pemerintah namun saat ini dirasa masih kurang. dari segi pemasaran masih mengacu pada promosi media sosial, harapannya promosi juga dilakukan dengan forum komunikasi atau langsung bertemu dengan pelaku wisata seperti biro, agent wisata, di luar daerah. Disamping itu, kerjasama yang berlangsung di tingkat daerah cukup baik, pemkab memperluas Kerjasama desa wisata dengan menambahkan jaringan dari kominfo melalui digital marketing. Hal ini dirasa sangat membantu menjangkau pasar lebih luas hingga ke kota-kota besar, antar instansi, dan antar perusahaan baik milik negara maupun milik swasta. Kerjasama dengan kominfo dan dinas pariwisata baik di tingkat kabupaten maupun provinsi berperan penting dalam promosi desa wisata yang dikemas ke dalam event pariwisata di kawasan desa wisata Tepus. Seperti yang sudah berlangsung yaitu Gunungkidul Tourism Fest 2023 yang digelar di Desa Wisata Tepus. Selain upaya di atas, narasumber juga mengakui adanya program-program yang telah diupayakan pemerintah untuk promosi wisata contohnya kegiatan Explore Tepus maupun media sosial Visiting Jogja dari Dinas Pariwisata DIY yang sudah berjalan sekitar 2 tahun lebih.

3.3. Kelembagaan dan Tata Kelola Pariwisata Daerah

Dalam hal meningkatkan tata kelola pariwisata diperlukan juga kesadaran dari berbagai pihak untuk menjaga dan merawat kelestarian lingkungan. Menurut pemangku kepentingan, untuk meningkatkan kesadaran diperlukan upaya pemerintah untuk terus melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga, bangga dan meningkatkan performa dan kualitas lingkungan maupun wisata itu sendiri. Pemerintah juga harus menjadi role model bagi masyarakat dalam hal pelayanan yang baik sesuai dengan Sapta Pesona. Sehingga, secara kelembagaan kebijakan yang diimplementasikan bersifat top down. Berkaitan dengan sapta pesona, desa wisata tepus sudah mengimplementasikan hal ini dan tercermin dalam beberapa aspek diantaranya :

- a) Aman: Menjamin keamanan bagi para pengunjung dengan membentuk tim keamanan yang solid.
- b) Tertib: Menjaga ketertiban baik antar pelaku wisata maupun antar wisatawan. Ketertiban ini dimulai dari peraturan ataupun rule yang disepakati oleh berbagai pihak, kerja sama tertulis serta komunikasi yang baik antar pelaku wisata.

- c) Bersih: Memastikan kebersihan lingkungan, ketersediaan tempat sampah, air bersih, dan tidak ada limbah di sembarang tempat.
- d) Sejuk: Menciptakan suasana yang nyaman dan menyegarkan. Hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah dalam program reboisasi
- e) Indah: Menampilkan keindahan alam atau budaya. Desa Wisata Tepus punya keduanya.
- f) Ramah: Memberikan pelayanan yang baik kepada pengunjung.
- g) Kenangan: Meninggalkan kesan positif bagi para wisatawan. Hal ini bisa berupa souvenir yang dibeli di Kawasan wisata maupun foto yang diabadikan oleh wisatawan.

Apabila kebijakan di atas berkaitan dengan SDM dan kelembagaan, pemerintah juga mengupayakan pembangunan pengelolaan wisata secara fisik sejak adanya kebijakan keleluasaan penggunaan anggaran baik APBKAL/APBDES dan Dana Desa dari pemerintah pusat seperti pembangunan jalan menuju Pantai watunene, Pantai poktunggal, dan fasilitas menuju Goa Watulawang dan Goa Cengkal.

Berkaitan dengan pariwisata khas daerah, pemerintah telah mengangkat pariwisata khas daerah di dalam pelaksanaan pariwisatanya yang meliputi keunikan geografis yaitu perbukitan dan pesisir sehingga wisatanya potensial di bidang ini, makanan khas daerah yang ada di wilayah Tepus meliputi hasil laut, kemudian kesenian yang berkembang di masyarakat seperti kethoprak dan jathilan juga merupakan warisan nenek moyang, serta tetap meleagalkan dan menjunjung tinggi bahasa khas daerah Tepus yang mana tidak ada di kawasan wisata lain. Berkaitan dengan pariwisata khas jogja, masyarakat Tepus memiliki batik yang identik dengan kota jogja. Motif yang dikembangkan sesuai dengan alam sekitar yang dilihat sehari-hari. Intinya, ciri khas dari kabupaten Gunungkidul hampir semuanya bisa ditemukan di desa wisata Tepus. Mulai dari pantai pasir putihnya, pegunungan seribu dengan ciri batuan karstnya, goa dengan sungai bawah tanahnya, hingga hasil bumi dari sawah tadah hujannya menggambarkan kehidupan masyarakat Gunungkidul.

Apabila dilihat dari kacamata pengelola wisata, implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan diukur dari indikator kelembagaan dan tata kelola wisata, terlihat sudah ada satu pandangan yang sama terkait dengan imolementasi sapta pesona. Menurut narasumber, sapta pesona sudah digencarkan dan digalakkan sebelum kita menuju kompetisi nasional Anugerah Desa Wisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Proses sosialisasi sapta pesona ini dilakukan dengan pendekatan kepada masyarakat melalui pelatihan maupun praktik langsung dalam aktivitas sehari-hari.

Berkaitan dengan pariwisata khas daerah, antara pemerintah dengan pengelola wisata memberikan pendapat yang berbeda namun tetap menunjukkan esensi yang sama diantaranya sapta pesona yang lekat membentuk karakter masyarakat desa wisata Tepus sehingga dikenal memiliki pelayanan ramah, unggah-ungguh, budaya, adat, dan unsur gotong royong yang sangat bisa dilihat di masyarakat. Selain pemangku kebijakan dan pengelola wisata, data juga diambil dari wisatawan untuk melihat sudut pandang dan penilaian terkait dengan keberhasilan implementasi pariwisata berkelanjutan di desa wisata Tepus

Gunungkidul. Berdasarkan data yang diambil, memberikan hasil analisis di bawah ini :

Melalui lima narasumber mereka memiliki jawaban yang sama tentang keberhasilan kebijakan pemerintah daerah sehingga terwujud pariwisata seperti saat ini. Sebab, kelimanya merupakan wisatawan yang sudah pernah berkunjung sebelumnya. Sehingga mereka mengetahui perubahan dari waktu ke waktu. Pada butir pertanyaan yang berkaitan dengan kesan yang mereka peroleh setelah berkunjung dan memperoleh pengalaman dari aktivitas berwisata di Desa wisata tepus kelimanya memiliki kesan yang baik. Ada yang merasa tenang, nyaman, terhibur, bebas, tempat terbaik untuk berlibur dan lain sebagainya. Kemudian, setelah ditanyakan seputar hal-hal yang kurang optimal dan luput dari kebijakan pemerintah beberapa memberikan keterangan berupa pengalamannya terkait praktik pungli, sampah yang berserakan, jaringan yang susah dan sisanya tidak bisa memberikan keterangan karena menurut mereka sudah cukup baik. Meskipun demikian, kekurangan-kekurangan yang ada tidak menyurutkan keinginan pengunjung untuk kembali mengunjungi desa wisata Tepus.

Terkait dengan pertanyaan minat berbelanja oleh-oleh, ada yang dengan tegas mengatakan berminat ada yang kurang berminat karena masih bisa kembali lagi yang jelas, semua wisatawan yang berhasil di wawancara pasti akan makan di lokasi wisata. Dilihat dari sisi kemandirian dan kenyamanan berwisata, mayoritas mengatakan aman dan nyaman. Hanya ada satu wisatawan yang menghawatirkan penerangan di jalan apabila pulang terlalu malam. Meskipun begitu, pengunjung wisata tetap akan menunjukkan pengalaman berwisatanya di sosial media yang mereka punya seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya saat usai berkunjung dan sering muncul di beranda sosial media mereka.

Wisatawan mengaku, ada keunikan dan kekhasan berwisata ke desa wisata Tepus. Pun mereka memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang melihat dari sisi masyarakatnya yang ramah, ada yang melihat dari makanan khasnya, ada pula yang menilai dari lingkungan alamnya yang berbeda dengan destinasi wisata yang lain. Mereka juga menyatakan kepuasan yang luar biasa dengan memberikan rating maupun penilaian dalam wawancara yang sudah peneliti lakukan.

4. Kesimpulan

Setelah serangkaian penelitian dilakukan, peneliti mampu menarik beberapa kesimpulan terkait dengan implementasi kebijakan tentang pariwisata berkelanjutan sesuai dengan indikator RIPPARDA BAB II pasal 3 ayat 4 sebagai berikut :

a) Pariwisata yang menggerakkan perekonomian daerah

berdasarkan hasil penelitian, pemerintah sebagai pemangku kebijakan merasa implementasi kebijakan sudah optimal dan mampu mewujudkan pariwisata yang menggerakkan perekonomian daerah. Disisi lain, pengelola wisata merasa kebijakan belum optimal sebab masih minimnya lapangan kerja yang berhasil dibuka.

b) Kualitas dan kuantitas destinasi wisata pada indikator ini pemangku

kebijakan maupun pengelola wisata merasa kebijakan sudah optimal sebab secara kuantitas destinasi wisata semakin berkembang. Secara kualitas, destinasi wisata

sudah semakin baik dalam hal penyediaan fasilitas, pelayanan, kenyamanan dan lain sebagainya.

c) Aktivitas mengkomunikasikan pariwisata daerah berdasarkan hasil penelitian masih ada kesenjangan antara pemangku kebijakan dengan pengelola wisata. Pemangku kebijakan merasa sudah melakukan yang terbaik dalam hal mengkomunikasikan pariwisata melalui sosial media. Sedangkan bagi pengelola wisata merasa belum optimal karena pengkomunikasian hanya fokus pada media sosial saja semestinya melalui agen dan biro perjalanan juga dilakukan.

d) Kelembagaan dan tata kelola wisata pada indikator ini hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan sudah optimal bagi kedua belah pihak. Sebab, sapta pesona serta pariwisata khas daerah benar-benar diimplementasikan sehingga membuat wisatawan nyaman berkunjung ke desa wisata Tepus Gunungkidul.

Hasil penelitian Sesuai dengan pendapat Mazmanian (1984) menjelaskan bahwa: implementasi kebijakan yang sangat luas menyebabkan munculnya penilaian sehingga tidak jarang muncul penilaian bahwa sebuah kebijakan berhasil atau gagal. Khususnya bagi mereka yang menjadi target kebijakan karena mereka merasa masih sulit dalam menerima atau mendapatkan layanan yang baik.

Ucapan Terima Kasih

Terselesaikannya Tugas Akhir Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan peran berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Spardi, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi.
2. Ibu Dr. Marita Ahdiyana, M.Si., selaku Koorprodi Administrasi Publik dan Dosen Penguji Tugas Akhir Skripsi yang telah sabar, membantu, memberikan kritik, saran, dan arahan kepada saya untuk lebih baik lagi selama prose penyusunan hingga selesainya Tugas Akhir Skripsi ini.
3. Ibu Dra. Lena Satlita, M.Si., selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Penguji yang telah memberikan arahan serta bimbingan dari awal penyusunan hingga selesainya Tugas Akhir Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Drs. Argo Pambudi, M.Si., selaku Sekertaris Penguji yang sudah memberikan saran dan koreksi untuk perbaikan secara komprehensif terhadap Tugas Akhir Skripsi ini.
5. Bapak Fahrudin, Bapak Suheri, Bapak Turisty, Bapak Suradal, Bapak Budi, Kak Sulaeman, Kak Risa Alifa, Ibu Nur Sholihah, dan Kak Antonius Bkti selaku narasumber penelitian ini.
6. Semua pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak bisa saya sebutkan satu, terimakasih atas segala bantuan yang diberikan kepada saya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Terimakasih saya ucapkan kepada seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya disini, tapi semoga kedepannya kita akan mengukir sejarah bersama.

8. Terakhir, saya sangat berterimakasih kepada saya sendiri yang telah sejauh ini berproses meski belum begitu maksimal namun tetap berjalan di jalan yang sama dari awal hingga selesai.

Semoga semua bantuan seluruh pihak akan mendapatkan balasan yang setimpal dan menjadi amal kebaikan nantinya. Semoga kebaikan selalu menyertai kita semua dan lancar dalam segala hal mendapatkan berkah dari Allah Swt. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan piha-pihak lain yang membutuhkan.

Referensi

- [1] Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta : Bandung
- [2] Anggreni, M. A., Suteja, I. W., & Indrapati, I. (2022). Dampak Perkembangan Pariwisata Pada Lingkungan Fisik (Sarana Prasarana) Dan Pengaruhnya Terhadap Sempadan Pantai Di Desa Wisata Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. *Journal Of Responsible Tourism*, 1(3), 301-312.
- [3] Anhar. (2021). *Perkembangan Kawasan Wisata Pantai Pulang Syawal Di Desa Tepus Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta*. Universitas Gadjah Mada
- [4] Anhar, F. (2013). *Perkembangan Kawasan Wisata Pantai Pulangsawal Di Desa Tepus Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta*. (Tesis, Universitas Gadjah Mada)
- [5] Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan implementasi kebijakan public kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam fakta realitas*. Gorontalo. UNG Press
- [6] Kusumo H. (2018). *Harian Jogja: Kondisi Sampah di Pantai Gunungkidul Mengkhawatirkan*. *Kondisi Sampah di Pantai Gunungkidul Mengkhawatirkan (harianjogja.com)* (diakses pada 10 Maret 2023)
- [7] *Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan*. PERDA Kab. Gunungkidul No. 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan [JDIH BPK RI] (diakses pada 15 Maret 2023)
- [8] Ferri. (2018). *Tribun Jogja: Sampah Menumpuk di Kawasan Wisata Jadi PR Pemkab Gunungkidul*. <https://jogja.tribunnews.com/2018/02/23/sampah-menumpuk-di-kawasan-wisata-jadi-pr-pemkab-gunungkidul> (diakses pada 10 Maret 2023)